

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi kasus di Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)

Rosy Wira Hestanto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, rosy.23532@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Campbell J.P. yang mencakup lima indikator yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Program BKKD telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Infrastruktur desa menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal jalan lingkungan dan fasilitas umum. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi, Namun demikian, Program BKKD masih dianggap perlu adanya peningkatan dalam hal perencanaan dan keterlibatan masyarakat agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Desa, Insfrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This research aims to assess the effectiveness of the Special Financial Assistance Program to Villages (BKKD) in improving infrastructure quality and community welfare in Banjarpanjang Village, Ngariboyo District, Magetan Regency. The effectiveness theory used in this research refers to the concept proposed by Campbell J.P. which includes five indicators: program success, target success, program satisfaction, input and output levels, and overall goal achievement. In this research, the method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation. The findings of this research indicate that overall the BKKD Program has been implemented in accordance with predetermined objectives. Village infrastructure shows significant improvement, especially in terms of environmental roads and public facilities. This program also has a positive impact on implementation, with a fairly high level of community satisfaction. However, the BKKD Program is still considered to need improvement in terms of planning and community involvement so that the results obtained are more optimal and sustainable.

Keywords: Effectiveness of the Special Financial Assistance Program for Villages, Infrastructure, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini memerlukan perhatian terhadap interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, serta potensi dan keragaman wilayah yang ada. Menurut Wasistiono (2003:59), penting untuk memahami bahwa hubungan

kewenangan harus mempertimbangkan keunikan dan variasi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pelayanan publik dan penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan seimbang, serta memperhatikan peluang dan tantangan yang muncul dalam kompetisi global dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, disertai hak dan kewajiban untuk mengelola otonomi

daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Otonomi desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bertujuan untuk memperkuat dan mengelola potensi yang ada di tingkat lokal serta memberikan kesempatan bagi ide-ide masyarakat menuju kemandirian desa. Desa diakui sebagai entitas hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan asal-usul dan tradisi yang diakui dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pemerintah nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, otonomi desa membuka kesempatan dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, baik melalui organisasi sosial maupun lembaga adat, untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Namun, kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengurus hal-hal internalnya cenderung terbatas jika tidak didukung oleh dana, karena pada dasarnya pembiayaan akan berhubungan erat dengan fungsi yang dijalankan, sesuai dengan prinsip "money follows function". Oleh karena itu, perlu adanya desentralisasi kewenangan yang sering dibahas sebagai peluang untuk mengatur keuangan yang ada di desa.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi hak desa, yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa serta dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, salah satu pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dukungan finansial ini diharapkan dapat mendanai berbagai proyek pembangunan di desa guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Dana dari kabupaten atau kota disalurkan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa.

Pembangunan di tingkat nasional dan daerah sangat terkait erat dengan proses pembangunan desa, mengingat mayoritas penduduk masih terkonsentrasi di desa, yang menjadikannya fondasi kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Selama ini, perencanaan pembangunan lebih berjalan secara hierarkis daripada melibatkan partisipasi, sehingga menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek dalam pembangunan. Sumber utama pendapatan desa di Kabupaten Magetan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Bantuan keuangan antar pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKD) yang efektif merupakan faktor utama dalam mencapai berbagai dampak positif. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak tepat dapat menghambat kemajuan desa, menimbulkan masalah hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Ada beberapa poin penting mengenai signifikansi pengelolaan anggaran BKD yang

dapat diraih. Dengan pengelolaan yang efisien, BKD dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan mencapai target pembangunan yang telah ditentukan.

Table 1. Penetapan Pemerintah Desa Penerima, Besaran, dan Peruntukan (BLKGD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	ALOKASI DANA
1	2	3	4
1	BARAT	6	440.000.000
2	BENDO	6	955.000.000
3	KARANGREJO	4	589.000000
4	KARAS	3	242.000.000
5	KARTOHARJO	3	575.000.000
6	KAWEDANAN	7	1.265.000.000
7	LEMBEYAN	9	3.707.000.000
8	MAGETAN	3	522.000.000
9	MAOSPATI	4	615.000.000
10	NGARIBOYO	6	910.000.000
11	NGUNTORONAD I	7	990.000.000
12	PANEKAN	7	600.000.000
13	PARANG	7	890.000.000
14	PLAOSAN	9	1.287.000.000
15	PONCOL	4	395.000.000
16	SIDOREJO	4	540.000.000
17	SUKOMORO	3	185.000.000
18	TAKERAN	8	1.190.000.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024

Table 1. menunjukkan penetapan pemerintah desa penerima, besaran, dan peruntukan (BKD) di Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi dana BKD dari Kabupaten Magetan untuk tahun 2024 mencapai Rp. 46.401.800.000,- yang berasal dari APBDes Kabupaten Magetan dan disalurkan kepada 163 desa. Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2024, dijelaskan bahwa BKD bertujuan untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pembangunan, serta memberikan bantuan keuangan kepada desa.

Meskipun program ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa, efektivitasnya masih dipertanyakan, mengingat adanya kendala dalam

pengelolaan, penyerapan dana, serta dampak yang jelas terhadap masyarakat. Desa Blanjarpajang, yang berada di Kecamatan Ngariblojo, merupakan salah satu desa yang menerima dana bantuan keuangan khusus. Namun, pertanyaan muncul mengenai apakah bantuan ini benar-benar telah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan penduduk.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa efektif Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Blanjarpajang, Kecamatan Ngariblojo, Kabupaten Magetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami seberapa efektif Program BKD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas Program BKD dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah Desa Blanjarpajang dan pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan efisiensi program BKD.

Tabel 2. Total Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Kabupaten Magetan Tahun 2022-2024.

NO	TAHUN	NOMINAL
1	2022	Rp. 23.037.878.660,-
2	2023	Rp. 39.871.680.000,-
3	2024	Rp. 46.401.800.000,-

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024

Tabel 2. menunjukkan total penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Kabupaten Magetan Tahun 2022-2024. Tabel ini memberikan gambaran mengenai alokasi dana yang meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program ini tetap ada, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.



Gambar 1. Kondisi Jalan Desa Banjarpanjang sebelum ada BKD

Sumber: Dokumentasi Desa Banjarpanjang

Gambar 1. menunjukkan kondisi jalan di Desa Blanjarpajang yang masih memerlukan perhatian, meskipun telah ada program BKD. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan yang diterima harus diarahkan dengan jelas agar dapat mendukung berbagai program pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program BKD dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Blanjarpajang, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang berfokus pada efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BLKKD) dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Blanjarpajang, Kecamatan Ngariblojo, Kabupaten Magetan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Metode penelitian ini mencakup lokasi penelitian, jenis dan dasar penelitian, sumber data, metode pencarian informan, pengumpulan data, dan analisis data (Sugiyono, 2018).

Metode kualitatif mengandalkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk menghasilkan data deskriptif. Validitas, dependabilitas, dan objektivitas adalah beberapa syarat untuk data penelitian akhir. Validitas dicapai ketika tingkat akurasi atau kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian dapat dipastikan. Dalam penelitian ini, pengujian validitas, reliabilitas, dan objektivitas data menjadi penting untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blanjarpajang, yang terletak di Kecamatan Ngariblojo, Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih karena terdapat masalah terkait penggunaan bantuan keuangan bagi pemerintah desa, di antaranya realisasi hasil yang dicapai masih kurang memuaskan, ketidakcocokan antara tujuan program dengan kebutuhan masyarakat, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Selain itu, penggunaan sumber daya (input) tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh (output), dan program sering kali hanya berjalan sebagai formalitas tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, keberhasilan program, yang menilai sejauh mana pelaksanaan Program BLKKD di Desa Blanjarpajang dapat dikatakan efektif berdasarkan kemampuan operasional pelaksana program. Kedua, keberhasilan sasaran, yang menilai apakah program ini tepat dalam menjangkau kelompok atau sektor yang menjadi fokus utama. Ketiga, kepuasan terhadap program, yang diukur berdasarkan sejauh mana ekspektasi masyarakat sesuai

dengan hasil yang diperoleh. Keempat, tingkat input dan output, yang menilai hubungan antara program yang dijalankan dengan rencana dan hasil yang dicapai. Terakhir, pencapaian tujuan secara menyeluruh, yang menilai sejauh mana program dapat memenuhi semua tujuannya melalui langkah-langkah pelaksanaan yang baik.

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang memiliki pengetahuan mengenai efektivitas Program BLKKD. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan tersebut meliputi Kepala Desa Blanjarpanjang, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dari partisipan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati kondisi di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip, laporan, dan referensi lain yang relevan dengan efektivitas program. Data primer diperoleh langsung dari individu yang menjadi target penelitian, sedangkan data sekunder mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip dan laporan yang relevan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari merumuskan masalah hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data melibatkan pemilihan hal-hal pokok dan fokus pada informasi penting, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data disajikan, untuk memahami hasil penelitian secara keseluruhan.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas Program BLKKD dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Blanjarpanjang. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik di tingkat desa, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keefektifan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di

Desa Blanjarpanjang Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

1. Keberhasilan Program

Berdasarkan temuan dari penelitian di lapangan, pelaksanaan Program Bantuan Keluarga Khusus Delsa (BLKKD) di Delsa Blanjarpanjang menunjukkan hasil yang memuaskan. Program ini dikelola oleh perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mampu mengatur pelaksanaan program sesuai dengan kapasitas operasional yang ada.

Meskipun mayoritas pelaksana kegiatan tidak memiliki pendidikan formal yang berkaitan langsung dengan bidang teknik, mereka tetap dapat melaksanakan tugas operasional berkat pengalaman, pelatihan dasar, dan pendampingan teknis. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan dalam membaca gambar teknis dan merencanakan jadwal kerja yang lebih efisien.

Dari sisi operasional, kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat dan material bangunan dari pemasok lokal. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak memberikan tekanan kapasitas kerja pelaksana, tetapi lebih kepada penyesuaian dengan potensi dan sumber daya yang ada di desa.

Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kebijakan program sangat bergantung pada sumber daya dan kemampuan pelaksana di lapangan, termasuk keahlian teknis dan efisiensi dalam bekerja. Ripley dan Franklin (1986) juga menekankan pentingnya keselarasan antara rancangan program dan kapasitas operasional para pelaksananya.

Penelitian oleh Sutrisno (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa yang disesuaikan dengan kemampuan perangkat desa cenderung lebih sukses karena dapat menghindari kerumitan teknis yang tidak sesuai dengan situasi lapangan.

Keberhasilan Program BLKKD di Desa Blanjarpanjang tidak hanya diukur dari hasil fisik yang dicapai, tetapi juga dari kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kapasitas setempat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efisien dan mampu beradaptasi dengan kondisi desa. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis masih sangat diperlukan agar pelaksana program di masa mendatang dapat beroperasi dengan lebih efektif dan profesional.

2. Keberhasilan Sasaran Program

Program BLKKD di Delsa Blanjarpanjang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, baik dari segi kelompok maupun kebutuhan masyarakat. Sasaran utama program ini adalah masyarakat desa secara luas, terutama yang berada di wilayah dengan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan drainase. Sasaran program ini

terutama adalah masyarakat desa secara luas, khususnya yang berada di wilayah dengan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Proses penetapan sasaran dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdels) dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan masyarakat, BLPD, dan tokoh informal. Hal ini memastikan bahwa sasaran program bersifat partisipatif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran program bersifat partisipatif dan kontekstual, sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam penetapan sasaran, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pemerataan dan distribusi manfaat program. Beberapa dusun, seperti Dusun Pulutan, belum sepenuhnya merasakan dampak dari program ini. Walaupun beberapa dusun telah merasakan manfaat pembangunan, contohnya Dusun Panjang, dusun lainnya seperti Pulutan belum sepenuhnya merasakan efek dari program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLKKD telah berhasil dalam menentukan target utama, yaitu pembangunan infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung pada peningkatan akses dan kesejahteraan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLKKD di Delsa Blanjarpajang telah berhasil dalam menentukan target utama, yaitu Pembangunan infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung pada peningkatan akses dan kesejahteraan warga

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, penting untuk merancang perencanaan jangka menengah dan penentuan prioritas yang adil agar program dapat menjangkau semua daerah desa secara bertahap. Meskipun terdapat keberhasilan dalam penentuan sasaran dan keterlibatan warga dalam perencanaan program, masih diperlukan pendekatan perencanaan jangka menengah dan penentuan prioritas yang adil agar program dapat menjangkau semua daerah desa secara bertahap.

Dengan demikian, keberhasilan sasaran Program BLKKD di Delsa Blanjarpajang dapat disimpulkan telah tercapai secara optimal, karena sasaran program jelas dan terukur, serta hasil program dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sasaran Program BLKKD di Delsa Blanjarpajang telah tercapai secara optimal, karena Sasaran program jelas dan terukur, Sasaran ditetapkan berdasarkan musyawarah, Sasaran menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan, tingkat kepuasan terhadap program

dinilai melalui perbandingan antara ekspektasi masyarakat dan hasil akhir dari program BLKKD yang telah dilaksanakan di Delsa Blanjarpajang. Secara keseluruhan, masyarakat merasa positif terhadap adanya bantuan BLKKD karena dinilai berdampak positif dalam peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Penelitian sebelumnya oleh Anjani (2021) di Kabupaten Madiun juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BLKKD cenderung tinggi ketika program dilaksanakan secara partisipatif dan hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat yang disampaikan saat perencanaan.

Pembangunan jalan di Dusun Panjang yang didanai oleh Program Bantuan Keluarga Khusus Desa (BLKKD) memberikan dampak besar dalam memperbaiki kualitas akses bagi masyarakat, terutama petani yang bergantung pada hasil pertanian untuk kehidupan mereka. Sebelumnya, jalan ini hanya berupa jalan yang sudah rusak dan licin, terutama saat musim hujan, sehingga menghambat proses pengangkutan hasil panen dan perawatan lahan. Dengan adanya perbaikan pada jalan ini, biaya transportasi menjadi lebih rendah, kerusakan kendaraan berkurang, dan waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari sawah ke rumah atau pasar menjadi lebih cepat.

Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa jalan yang dibangun memiliki kualitas struktur yang baik dan mampu mendukung aktivitas pertanian. Peningkatan akses ini juga berkontribusi terhadap produktivitas dan efisiensi kerja para petani. Namun, ada beberapa masukan dari penduduk yang menginginkan adanya pemeliharaan secara teratur dan perluasan jalan menuju area persawahan lainnya yang masih belum terjangkau, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Secara keseluruhan, pembangunan jalan di Dusun Panjang yang didanai oleh BLKKD mendapatkan tanggapan positif dan kepuasan yang tinggi dari masyarakat, karena memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan ekonomi warga.

Program BLKKD yang dilaksanakan di Delsa Blanjarpajang juga memberikan kontribusi signifikan bagi bidang pelayanan sosial, salah satunya dengan pembangunan gedung Posyandu. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan bagi ibu dan anak, sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial yang berbasis komunitas, terutama di Dusun Krajan yang sebelumnya belum memiliki gedung Posyandu tetap. Sebelum gedung Posyandu yang baru dibangun, pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan berat badan anak, vaksin, dan

penyuluhan mengenai nutrisi biasanya diadakan di rumah kader atau dengan meminjam ruang di rumah penduduk yang terbatas. Situasi ini dianggap tidak memadai dan sering membatasi jumlah peserta yang dapat hadir.

4. Tingkat Input dan Output

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian di desa Banjarpanjang, indikator mengenai Tingkat Input dan Output menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BLKKD) sudah melewati tahap perencanaan yang melibatkan partisipasi. Pada tahap awal, program yang dirancang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan penguatan masyarakat. Proses perencanaan dilakukan dengan beberapa mekanisme utama. Pertama, musyawarah desa (musdels) yang diadakan secara rutin berfungsi sebagai forum utama untuk menetapkan prioritas program. Musdels ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kelompok warga, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama. Selain itu, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) juga merupakan bagian penting dari proses input, di mana FGD dilaksanakan dengan kelompok tertentu seperti petani, perempuan, dan pemuda. Melalui FGD, didapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kebutuhan spesifik dari setiap kelompok, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan program agar lebih tepat sasaran.

Pada tahap output, sebagian besar program yang telah disiapkan sebelumnya berhasil dilaksanakan dengan baik. Beberapa pencapaian nyata dari program BLKKD meliputi perbaikan jalan desa sepanjang 2 kilometer, renovasi tempat umum seperti posyandu dan balai desa, serta rehabilitasi saluran irigasi pertanian. Pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan harmonisasi antara program yang dibuat pada tahap input dengan hasil yang diwujudkan di lapangan. Pelaksanaan program BLKKD di desa Banjarpanjang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara input yang direncanakan dengan output yang dicapai. Ini mencerminkan efektivitas proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Banjarpanjang, aspek input menunjukkan bahwa pengelolaan program BLKKD telah dilaksanakan dengan cara yang terstruktur dan

melibatkan partisipasi. Rencana program ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana desa, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan untuk memberdayakan kelompok masyarakat. Penyusunan program ini dilakukan melalui forum musyawarah desa yang terbuka dan melibatkan warga. Proses perencanaan partisipatif seperti ini sejalan dengan pandangan Friedmann (1992) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi instrumen penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, hubungan antara masukan dan hasil dalam pelaksanaan program BLKKD di Desa Banjarpanjang menunjukkan hubungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan yang melibatkan semua pihak dan berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat dapat menghasilkan output yang sesuai dan bermanfaat. Dengan demikian, penilaian terhadap indikator ini menunjukkan bahwa program BLKKD telah dijalankan dengan efektif dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Indikator tingkat input dan output merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BLKKD). Menurut Dunn (2003), input mencakup seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti dana, tenaga kerja, dan proses perencanaan, sementara output adalah hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan program.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan jangka panjang dari Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BLKKD). Indikator ini menunjukkan sejauh mana program mampu mencapai target utama yang telah direncanakan dan dicantumkan dalam visi pembangunan desa. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa suksesnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dalam sebuah program pembangunan dapat diukur melalui perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur masyarakat.

Tahapan untuk mencapai tujuan Program BLKKD di Desa Banjarpanjang dimulai dengan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Program yang diajukan dalam skema BLKKD disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur masyarakat serta perangkat desa. Program ini bukanlah sesuatu yang sementara, tetapi merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD), sehingga

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis, seperti peningkatan infrastruktur dasar, perbaikan layanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLKKD di Delsa Banjarpanjang telah memenuhi sebagian sasaran keseluruhan yang telah ditetapkan. Beberapa hasil yang dicapai mencakup peningkatan mutu infrastruktur desa, terutama perbaikan jalan lingkungan, yang telah memperlancar mobilitas warga dan mempercepat pengiriman hasil pertanian. Peningkatan kualitas layanan sosial, melalui renovasi posyandu dan sarana umum lainnya, telah meningkatkan kenyamanan serta partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan dan kegiatan sosial. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, melalui pelatihan dan dukungan teknis untuk kelompok tani dan usaha kecil, mulai menunjukkan perkembangan dengan bertambahnya kapasitas produksi serta pemasaran produk-produk lokal. Dampak yang terlihat dari pencapaian tersebut adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik serta adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan BLPD, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan program telah berhasil dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, terdapat beberapa catatan terkait hambatan teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik, seperti keterlambatan dalam pengadaan bahan karena pengaruh cuaca. Beberapa kegiatan pemberdayaan masih terbatas pada tahap pelatihan awal dan belum mencapai fase pendampingan yang berkelanjutan. Kendala-kendala ini menjadi hal yang penting dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan akan dijadikan pedoman untuk perbaikan program di tahun selanjutnya.

Menurut Dunn (2003), tujuan menyeluruh dari suatu kebijakan publik atau program pembangunan adalah perubahan positif yang berkelanjutan terhadap kondisi masyarakat. Hal ini tercapai jika setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara sinergis. Gaspersz (2002) dalam teori manajemen mutu menekankan bahwa pencapaian tujuan menyeluruh harus diukur dengan indikator hasil, bukan hanya output. Outcome dalam konteks BLKKD mencakup perubahan kondisi sosial-ekonomi, kepuasan warga, dan keberlanjutan manfaat program. Penelitian oleh Wahyuni (2021) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa keberhasilan program dana desa ditentukan oleh kelayakan tujuan, keterlibatan

masyarakat, dan tindak lanjut setelah pelaksanaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Delsa (BLKKD) di Delsa Banjarpanjang tergolong efektif. Program ini telah dijalankan sesuai dengan rencana, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun hasil teknis. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran air, telah selesai sesuai dengan rencana kerja, menunjukkan kemampuan operasional pelaksana yang baik dan dukungan kuat dari masyarakat.

Sasaran program ditentukan secara partisipatif melalui Musyawarah Delsa (Musdels) dan Focus Group Discussion (FGD), sehingga sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat. Sasaran yang dihasilkan berupa pembangunan infrastruktur fisik berhasil direalisasikan dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, menunjukkan akurasi dan realisme dalam penentuan sasaran.

Masyarakat umumnya menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap pelaksanaan Program BLKKD, terlihat dari kesesuaian antara harapan dan hasil akhir program. Pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di kalangan warga desa.

Input yang melibatkan partisipasi, pembagian, anggaran akurat, serta kerjasama baik, menghasilkan output sesuai dengan rencana. Hasil proyek pembangunan, seperti rabat beton dan talud, direalisasikan dengan baik dan bermanfaat langsung. Keterkaitan antara input dan output menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Program BLKKD berhasil mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa secara menyeluruh, yakni meningkatkan aksesibilitas, keamanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian dan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan manfaat program tetap berlanjut, menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini tidak hanya fokus pada jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BLKKD) di masa mendatang adalah:

1. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten secara rutin mengadakan pelatihan baik teknis maupun manajerial untuk para pelaksana program, khususnya bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta Tim Pengelola Bantuan (TPBLJ). Materi pelatihan ini dapat mencakup perencanaan teknis, penyusunan RAB, pengelolaan anggaran, serta pengawasan dan pelaporan terkait pembangunan infrastruktur.
2. Pemerintah desa disarankan untuk merumuskan tujuan dan target program dengan cara yang lebih terperinci, dapat diukur, dan berdasarkan data, sehingga tingkat pencapaian tujuan dapat dinilai secara objektif. Tujuan perlu dirumuskan dalam bentuk indikator keberhasilan

- yang jelas, contohnya peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses ke jalan, atau peningkatan frekuensi kunjungan ke Posyandu setelah pembangunan.
3. Sebelum menjalankan program, pemerintah desa perlu melakukan pemetaan harapan warga secara terstruktur, misalnya dengan kuesioner, wawancara, atau melalui forum musyawarah. Ini sangat penting agar pelaksana program dapat memahami apa yang diinginkan masyarakat, seperti harapan tentang jalan yang berkualitas, irigasi yang berfungsi dengan baik, dan fasilitas kesehatan yang memadai.
 4. Disarankan agar semua masukan program, seperti pemilihan jenis kegiatan (jalan, irigasi, posyandu), spesifikasi teknis, dan pendanaan, dibuat melalui proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai elemen. Perencanaan yang melibatkan semua pihak memungkinkan masukan yang dirancang lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
 5. Pemerintah desa merancang pelaksanaan program BLKKD dengan cara yang teratur, bertahap, dan sistematis, dimulai dari pengidentifikasian isu, penentuan sasaran, penyusunan rencana kegiatan, hingga penilaian hasil. Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terencana, pencapaian tujuan secara keseluruhan akan lebih terukur dan dapat dikelola dengan baik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Sumbergepol Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 45–59.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, D. (2021). *Keberhasilan Pelaksanaan Program Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek*. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 5(1), 77–90.
- Wasistiono, S. (2003). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa di Kabupaten Madiun*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–125.
- Campbell, J. P. (1990). *Model of the Determinants of Job Performance*. In N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), *Personnel Selection in Organizations* (pp. 35–70). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terj. E. Kurniawan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Gaspersz, V. (2002). *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.